



**Kantor Wilayah Kemenkumham Padang
Setjen**

(408798)

**Untuk Periode yang Berakhir
Tanggal 31 Desember 2022**

AUDITED

**Jl. S.Parman No. 256 – Padang 25133
Sumatera Barat**

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Padang, Januari 2023
Kepala Kantor Wilayah,



R. Andika Dwi Prasetya
NIP. 19671217 199103 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	18
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	23
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	31
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	36
Pengungkapan Penting Lainnya	38
Lampiran dan Daftar	

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SUMATERA
BARAT**

**JL. S. PARMAN NO. 256 PADANG – SUMATERA BARAT 25133
TELEPON 0751 7055471, FAXIMILE 0751 7055510**

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Penggabungan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat tingkat wilayah selaku UAPPA-W yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan periode 31 Desember 2022 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggungjawab UAKPA.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internyang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi serta kinerja keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Padang, Januari 2023

Kepala Kantor Wilayah,



R. Andika Dwi Prasetya
NIP. 19671217 199103 1 002

Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat Periode 31 Desember 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja sampai dengan 31 Desember 2022.

Realisasi Pendapatan Negara pada 31 Desember 2022 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp10.997.190 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp0.

Realisasi Belanja Negara pada 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp17.844.514.771 atau mencapai 99 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp18.024.531.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2022. Nilai Aset per 31 Desember 2022 dicatat dan disajikan sebesar Rp105.355.458.881 yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp43.646.964; Aset Tetap (neto) sebesar Rp105.311.361.917; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp450.000.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp30.642.048,- dan Rp105.324.816.833.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp10.997.040 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp18.876.948.434 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp18.865.951.394). Defisit Kegiatan Non Operasional masing-masing sebesar Rp150 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar (Rp18.865.951.244).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2022 adalah sebesar Rp44.808.071.857 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp18.865.951.244 ditambah Koreksi yang menambah ekuitas sebesar Rp11.006.000 ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp79.371.690.220 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2022 adalah senilai Rp105.324.816.833.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk 31 Desember 2022 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA BARAT /
SEKRETARIAT JENDERAL
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	Th 2022		% thd Angg	Th 2021
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	10.997.190	0,00	20.279.213
JUMLAH PENDAPATAN		-	10.997.190	0,00	20.279.213
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	11.636.782.000	11.465.225.921	99%	11.238.416.391
Belanja Barang	B.4	6.387.749.000	6.379.288.850	100	5.209.879.307
Belanja Modal	B.5	0	-	0	661.368.730
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	0	-
JUMLAH BELANJA		18.024.531.000	17.844.514.771	99,00	17.109.664.428

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA BARAT
NERACA
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2022	2021
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	0	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2	0	
Piutang Bukan Pajak	C.3	0	
<i>Piutang Bukan Pajak (Netto)</i>		0	0
Persediaan	C.4	43.646.964	30.148.320
Jumlah Aset Lancar		43.646.964	30.148.320
ASET TETAP			
Tanah	C.5	84.712.482.000	24.327.802.000
Peralatan dan Mesin	C.6	10.494.079.704	10.492.776.635
Gedung dan Bangunan	C.7	19.934.042.000	18.786.545.000
Aset Tetap Lainnya	C.8	135.012.928	132.537.928
Konstruksi dalam pengerjaan	C.9	2.810.836.950	2.810.836.950
AKUMULASI PENYUSUTAN		(12.775.091.665)	(11.732.678.976)
Jumlah Aset Tetap		105.311.361.917	44.817.819.537
ASET LAINNYA			
Aset Lain-Lain	C.11	140.903.000	140.903.000
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.12	(140.453.000)	(140.453.000)
Jumlah Aset Lainnya		450.000	450.000
JUMLAH ASET		105.355.458.881	44.848.417.857
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.12	30.642.048	40.346.000
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.13	0	-
Utang Muka dari KPPN	C.14	-	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.15	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		30.642.048	40.346.000
JUMLAH KEWAJIBAN		30.642.048	40.346.000
EKUITAS			
Ekuitas	C.16	105.324.816.833	44.808.071.857
JUMLAH EKUITAS		105.324.816.833	44.808.071.857
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		105.355.458.881	44.848.417.857

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA BARAT
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE 31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2022	2021
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	10.997.040	9.445.015
JUMLAH PENDAPATAN		10.997.040	9.445.015
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	11.465.225.921	11.238.416.391
Beban Persediaan	D.3	111.972.390	180.769.964
Beban Barang dan Jasa	D.4	3.860.740.640	3.837.721.037
Beban Pemeliharaan	D.5	850.830.692	851.245.308
Beban Perjalanan Dinas	D.6	1.543.548.532	401.604.862
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	1.044.630.259	1.052.047.710
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.8	-	-
JUMLAH BEBAN		18.876.948.434	17.561.805.272
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(18.865.951.394)	(17.552.360.257)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus Pelepasan Aset Nonlancar	D.9	-	(856.165.089)
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		150	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		150	10.079.198
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		150	(846.085.891)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(18.865.951.244)	(18.398.446.148)
SURPLUS/DEFISIT LO		(18.865.951.244)	(18.398.446.148)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA BARAT
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE 31 DESEMBER 2022 DAN 2021***(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	2022	2021
EKUITAS AWAL	E.1	44.808.071.857	59.046.736.889
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(18.865.951.244)	(18.398.446.148)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	11.006.000	(8.286.393.905)
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVAL	E.3.5	-	(8.286.393.905)
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	11.006.000	-
JUMLAH		11.006.000	(8.286.393.905)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	79.371.690.220	12.446.175.021
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		60.505.738.976	-5.952.271.127
EKUITAS AKHIR	E.5	105.324.816.833	44.808.071.857

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Entitas berkedudukan di Jalan S. Parman No. 256 UlakKarang Padang.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat berkomitmen dengan visi ***“Mewujudkan Masyarakat Sumatera Barat yang Sadar Hukum dan Hak Asasi Manusia.”***

Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Terwujudnya politik legislasi yang berkualitas melalui pembentukan peraturan perundangan yang terencana;
- Terwujudnya Layanan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang cepat dan murah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- Terwujudnya penegakan hukum yang berkualitas di bidang Keimigrasian, Hak Kekayaan intelektual, kerja sama timbal

balik dengan Negara lain, Pembinaan Pemasayarakatan serta efektifitas koordinasi antar instansi penegak hukum;

- Terwujudnya kebijakan nasional yang mendorong penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia;
- Terwujudnya manajemen organisasi yang akuntabel dengan penyelenggaraan birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang professional;
- Terwujudnya aparat Kementerian Hukum dan HAM yang profesional dan berintegritas.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan periode 31 Desember 2019 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat. Laporan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat periode Juni 2022 ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat yang meliputi wilayah serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

Jumlah satuan kerja di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat adalah 1 satuan kerja.

Rincian satuan kerja tersebut tersaji sebagai berikut:

Rekapitulasi Jumlah Satker UAPPA-W

No	Kode Wil	Satker	Jumlah/Jenis Kewenangan				Jumlah Satker
			KP	KD	DK	TP	
1	0800	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Padang (408798)	-	1	-	-	1
Jumlah			-	1	-	-	1

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar

nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan periode 31 Desember 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

Pendapatan- LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-
LO*

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai

kekuatan hukum tetap.

- b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada

usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun

Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun
--	---------

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

AsetLainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software Komputer</i>	4
<i>Franchise</i>	5

Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebanyak sebelas kali dari DIPA awal, pagu awal sebesar Rp18.262.295.000 setelah revisi terakhir menjadi Rp18.024.531.000. Sehingga pagu anggaran terlihat sebagai berikut:

Uraian	31 DESEMBER 2022	
	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Negara Bukan Pajak	0	0
Jumlah Pendapatan	0	0
Belanja		
Belanja Pegawai	11.259.863.000	11.636.782.000
Belanja Barang	6.459.030.000	6.387.749.000
Belanja Modal	543.402.000	
Jumlah Belanja	18.262.295.000	18.024.531.000

Revisi yang dilakukan merupakan revisi penambahan pagu minus belanja pegawai, revisi penyesuaian halaman III DIPA, revisi pergeseran anggaran blokir dan revisi POK dalam satu KRO sehingga menambah nilai pagu anggaran.

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp10.997.190 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0. Pendapatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat terdiri dari Pendapatan

Realisasi
Pendapatan
Rp10.997.190

dari pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan, dan penerimaan kembali belanja pegawai dari tahun anggaran yang lalu dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	31 DESEMBER 2022		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	-	10.997.040	0,00
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang	-	150	0,00
Jumlah	-	10.997.190	0,00

Realisasi Pendapatan pada 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar 54,22% dibandingkan pada 31 Desember 2021. Realisasi Pendapatan mengalami penurunan dari sebesar Rp20.279.213 menjadi Rp.10.997.190 dikarenakan realisasi pendapatan pada periode ini hanya berasal dari pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan berupa sewa rumah dinas dan penerimaan kembali Belanja pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu berupa pengembalian kelebihan pembayaran tunjangan pegawai yang naik pangkat/JFT.

*Perbandingan Realisasi Pendapatan
Periode 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

URAIAN	REALISASI 31 DESEMBER 2022	REALISASI 31 DESEMBER 2021	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	755.000	0,00
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	10.997.040	9	#####
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	52.000	0,00
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang	150	1.295.198	0,00
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	-	8.732.000	0,00
Jumlah	10.997.190	10.834.207	1,50

B.2 Belanja

*Realisasi Belanja
Negara
Rp17.844,514.771*

Realisasi Belanja instansi pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp17.844.514.771 atau 99% dari anggaran belanja sebesar Rp18.024.531.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja
Periode 31 Desember 2022*

Uraian	31 DESEMBER 2022		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	11.636.782.000	11.465.225.921	98,53
Belanja Barang	6.387.749.000	6.379.288.850	99,87
Belanja Modal	0	0,00	0,00
Total Belanja Kotor	18.024.531.000	17.844.514.771	99,00
Pengembalian	0	0	0,00
Jumlah	18.024.531.000	17.844.514.771	99,00

Dibandingkan dengan 31 Desember 2021, Realisasi 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar 4,29% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan terdapatnya realisasi belanja pegawai sebesar Rp11.636.782 dan realisasi belanja barang sebesar Rp6.387.749.

*Perbandingan Realisasi Belanja
Periode 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

URAIAN	REALISASI 31 DESEMBER 2022	REALISASI 31 DESEMBER 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	11.465.225.921	11.238.416.391	2,02
Belanja Barang	6.379.288.850	5.209.879.307	22,45
Belanja Modal	0	661.368.730	0,00
Jumlah	17.844.514.771	17.109.664.428	4,29

*Belanja Pegawai
Rp11.465.225.921*

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 11.465.225.921 dan Rp11.238.416.391. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang ber

kaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja pada 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar 2,01% dari 31 Desember 2021. Hal ini disebabkan antara lain oleh :

1. Terdapat kenaikan pembayaran gaji PNS sebesar 3,69%;
2. Bertambahnya jumlah pegawai yang berasal dari penerimaan CPNS Tahun Anggaran 2021 serta pegawai promosi dan mutasi;
3. Adanya perubahan jabatan pegawai dari JFU menjadi JFT sehingga mengakibatkan bertambahnya realisasi anggaran untuk tunjangan fungsional PNS;
4. Adanya pegawai yang masa jabatannya berakhir (pensiun).

*Perbandingan Belanja Pegawai
Periode 31 Desember 2022 dan 30 Desember 2021*

URAIAN	REALISASI 31 DESEMBER 2022	REALISASI 31 DESEMBER 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	11.361.618.869	10.957.422.316	3,69
Belanja Lembur	108.122.000	282.845.000	-61,77
Jumlah Belanja Kotor	11.469.740.869	11.240.267.316	2,04
Pengembalian Belanja Pegawai	(4.514.948)	(1.850.925)	-
Jumlah Belanja	11.465.225.921	11.238.416.391	2,02

B.4 Belanja Barang

*Belanja Barang
Rp6.379.288.850*

Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp6.379.288.850 dan Rp5.209.879.307. Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar 22,44% dari Realisasi Belanja Barang periode 30 Desember 2021.

*Perbandingan Belanja Barang
Periode 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

URAIAN	REALISASI 31 DESEMBER 2022	REALISASI 31 DESEMBER 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	1.453.344.768	1.334.193.669	8,93
Belanja Barang Non Operasional	761.433.645	652.242.459	16,74
Belanja Jasa	1.615.320.179	1.851.284.909	(12,75)
Belanja Pemeliharaan	850.830.692	851.245.303	(0,05)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1.572.888.532	401.604.862	291,65
Belanja Barang Persediaan	125.471.034	119.308.100	5,17
Jumlah Belanja Kotor	6.379.288.850	5.209.879.302	22,45
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	6.379.288.850	5.209.879.302	22,45

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Padang mengalokasikan belanja barang untuk penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp321.503.000. Anggaran tersebut terserap sebesar Rp320.323.769 yang terdiri dari Belanja Barang Operasional-Penanganan Pandemi COVID-19 berupa Pembelian lisensi aplikasi *zoom meeting*, masker dan *handsanitizer*. Realisasi ini juga berasal dari Belanja Barang Non Operasional Penanganan Pandemi COVID-19 berupa Pembelian Multivitamin, Selain itu realisasi ini berasal dari Belanja Barang Persediaan Penanganan Pandemi COVID-19 berupa Pembelian Masker dan Handsanitizer. Realisasi belanja penanganan Pandemi COVID-19 ini juga berasal dari Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 berupa Belanja Jasa Swab test untuk yang digunakan oleh pegawai untuk kegiatan insidental.

Rincian belanja Penanganan COVID-19 dapat dilihat sebagai berikut:

AKUN	URAIAN AKUN	PAGU	REALISASI	PENYERAPAN
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	15,903,000	15,714,590	98,82 %
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	275,200,000	275,100,445	99,96 %
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	29,000,000	28,354,734	97,77 %
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	1,400,000	1,154,000	82,43 %

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.4 Persediaan

Persediaan
Rp43.646.964

Nilai Persediaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp43.646.964 dan Rp30.148.320,-.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan
Periode 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Jenis	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021
Barang Konsumsi	43.646.964	30.148.320
Jumlah	43.646.964	30.148.320

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Persediaan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 merupakan sisa persediaan yang dibeli sendiri yang masih bersaldo dalam keadaan baik dan siap pakai. Saldo persediaan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0,-.

C.5 Tanah

Tanah
Rp84.712.482.000

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp84.712.482.000,- dan Rp24.327.802.000,-.

Rincian Saldo Tanah per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah Periode 30 Juni 2022

No	Uraian	Luas Tanah (m2)	Alamat	Nilai
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	504	JL. KEHAKIMAN NO.5 PADANG	724,828,000
2	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	2,222	JL. PADANG PASIR X	5,204,480,000
3	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	315	JL. JAKARTA	720,049,000
4	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	480	JL. ASRAMA HAJI	705,600,000
5	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	372	JL. BUNDA	432,813,000
6	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	640	JL. TEKNOLOGI VIII SITEBA	1,050,772,000
7	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	204	JL. WIRASAKTI KOMPI C SITEBA	317,179,000
8	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	500	JL. NGURAH RAI II NO. 1 AIR TAWAR	791,000,000
9	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	500	JL. NGURAH RAI II NO. 2 AIR TAWAR	791,000,000
10	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2,600	S. PARMAN NO.256+	6,095,700,000
11	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	1,850	Jl.Raya Bukittinggi-medan	233,294,000
12	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	1,079	Jl.Ke Talu	196,982,000
13	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	499	JL. IMAM BONJOL	298,913,000
14	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	320		343,571,000
15	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	1,250	JL. BATUSANGKAR-TABEK PATAH	1,342,075,000
16	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	605	JL. GAJAH MADA	327,895,000
17	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	320	JL PANTI - TALU	82,152,000
18	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	260	JLN KOTO KECIL	146,057,000
19	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	950	DEKAT KANTOR CAMAT	546,992,000
20	Tanah Rawa	3,015	-	3,976,450,000
21	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	4,426	JLN. PERINTIS KEMERDEKAAN BUKITTINGGI	60,384,680,000
	Jumlah			84,712,482,000

*Peralatan dan
Mesin
Rp10.494.079.704*

C.6 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp10.494.079.704,- dan Rp10.492.776.635,-.

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	10.492.776.635
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Transfer Masuk	159.785.371
Mutasi kurang:	
Transfer Keluar	-158.482.302
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	0
Penghapusan	0
Koreksi Pencatatan	0
Saldo per 31 Desember 2022	10.494.079.704
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	-9.531.692.202
Nilai Buku per 31 Desember 2022	962.387.502

Saldo Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing Rp9.531.692.202 dan Rp9.209.524.236. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset peralatan dan mesin yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

*Gedung dan
Bangunan
Rp19.934.042.000*

C.7 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp19.934.042.000 dan Rp18.786.545.000. Rincian mutasi Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Gedung dan Bangunan TA 2022

No	Uraian	Luas Bangunan (m2)	Alamat	Nilai	Keterangan
1	Bangunan Gedung Kantor Lainnya	4	JL. S. PARMAN NO 256 PADANG	6.961.000	POS SATPAM, PRAKIRAN, DAN AN GU
2	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	150		743.667.000	MUSHOLA KANWIL
3	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	350	JL. KEHAKIMAN NO 5 PADANG	745.943.000	RUMAH DINAS KAKANWIL
4	Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen	120	JL. PADANG PASIR X	255.752.000	RUMAH DINAS KADIV. ADMINISTRASI DAN PAGAR
5	Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen	140	JL. PADANG PASIR X	298.377.000	-
6	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	120	UNP PADANG	255.752.000	-
7	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	70	JL. JAKARTA ASRATEK	143.663.000	-
8	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	70	ASRAMA HAJI	149.189.000	-
9	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	70	ASRAMA HAJI	149.189.000	-

No	Uraian	Luas Bangunan (m2)	Alamat	Nilai	Keterangan
10	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	70	JL. BUNDA V WISMA WARTA	149,189,000	-
11	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	70	PADANG PASIR X	149,189,000	-
12	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	70	PADANG PASIR X	149,189,000	-
13	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	50	PADANG PASIR X	149,189,000	-
14	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	50	PADANG PASIR X	102,617,000	-
15	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	70	JL. WIRA SAKTI SITEBA (DEPAN KOMPI C)	143,663,000	JL. WIRASAKTI SITEBA ASET SUDAH LAMA ADA
16	Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen	50	JL. TEKNOLOGI VIII SITEBA PADANG	106,563,000	RUMAH DINAS JL. TEKNOLOGI SITEBA
17	Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen	50	JL. TEKNOLOGI VIII PADANG	106,563,000	RUMAH DINAS JL. TEKNOLOGI SITEBA
18	Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen	50	JL TEKNOLOGI VIII SITEBA PADANG	106,563,000	JL TEKNOLOGI SITEBA
19	Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen	50	JL TEKNOLOGI NO VIII PADANG	106,563,000	JL TEKNOLOGI SITEBA
20	Rumah Negara Golongan I Tipe E Permanen	60	JL. S. PARMAN NO 256 PADANG	127,876,000	RUMAH DINAS JL.S PARMAN NO 256 PADANG
21	Bangunan Tempat Sidang/Zitting	250		662,061,000	MUO MA
22	Bangunan Tempat Sidang/Zitting	305		807,714,000	MOU MA
23	Bangunan Tempat Sidang/Zitting Plaat	250		670,605,000	MUO MA
24	Bangunan Tempat Sidang/Zitting Plaat	250		670,605,000	MUO MA
25	Bangunan Tempat Sidang/Zitting Plaat	250		670,605,000	MOU MA
26	Gedung Pos Jaga Permanen	20	S.PARMAN	27,204,000	KANWIL

No	Uraian	Luas Bangunan (m2)	Alamat	Nilai	Keterangan
27	Bangunan Gedung Kantor Permanen	600	S.PARMAN NO.256 PADANG	1,681,481,000	GEDUNG C KANWIL
28	Bangunan Gedung Kantor Permanen	510	S.PARMAN NO.256 PADANG	1,429,259,000	GEDUNG C KANWIL
29	Bangunan Gedung Kantor Permanen	537	S.PARMAN NO.256	1,621,153,000	GEDUNG C KANWIL
30	Bangunan Gedung Kantor Permanen	293	S.PARMAN NO.256 PADANG	821,123,000	GEDUNG C KANWIL
31	Bangunan Gedung Kantor Permanen	225	NIPAH NO. 50 PADANG	201,427,000	GEDUNG C KANWIL
32	Bangunan Gedung Kantor Permanen	240	DAERAH KANDI	887,448,000	LPKN SAWAHLUNTO
33	Pagar permanen			2,842,170,000	TEMBOK KELL RTN SWH LNT
34	Pagar permanen			1,180,656,000	TEMBOK KLL RUTAN TALU
35	Pagar permanen			49,891,000	PAGAR RD AIR TAWAR
36	Pagar permanen			49,891,000	PAGAR RD. S. PARMAN
37	Pagar permanen			49,891,000	PAGAR RD TABING
38	Bangunan Gedung Tempat Kerja		JLM. PERINTIS KEMERDEKAAN BUKITTINGGI	1,147,497,000	BANGUNAN EX LAPAS BUKITTINGGI

Terdapat aset tetap gedung dan bangunan pada aplikasi SIMAK BMN Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat yang harus ditransfer ke Satuan Kerja, dengan rincian sebagai berikut :

1. Bangunan Gedung Kantor Permanen senilai Rp201.427.000 yang harus ditransfer ke Satuan Kerja Kantor Imigrasi Padang;
2. Bangunan Gedung kantor Permanen senilai Rp887.448.000 yang harus ditransfer ke LPKN Sawahlunto;
3. Pagar Permanen senilai Rp2.842.170.000 yang harus ditransfer ke Rutan Sawahlunto.

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Saldo Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing Rp3.232.924.463 dan Rp2.512.679.740.

C.8 Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap
Lainnya
Rp135.012.928*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp135.012.928 dan Rp132.537.928. Nilai Aset tetap lainnya per 31 Desember 2022 mengalami perubahan dibandingkan dengan per 31 Desember 2021, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	132.537.928
Mutasi tambah:	
Transfer Masuk	2.475.000
Mutasi kurang:	
Transfer Masuk	0
Saldo per 31 Desember 2022	135.012.928
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2022	-10.475.000
Nilai Buku per 31 Desember 2021	124.537.928

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.9 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

*Konstruksi
Dalam
Pengerjaan
Rp2.810.836.950*

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp2.810.836.950 dan Rp2.810.836.950.

Rincian KDP per 31 Desember 2022 sebagai berikut :

NO	NAMA KDP	NOMOR KONTRAK	NAMA KONTRAKTOR	NILAI KONTRAK	TANGGAL KONTRAK	PEKERJAAN	SALDO KDP
1	GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM Pengerjaan	W3.PL.02.01-146	PT. PROTEKNIKA JASA PRATAMA	2,323,000,000	24 November 2010	PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR 2 LANTAI LP WANITA PASAMAN (APBN-P) (100%)	2,323,000,000
2	GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM Pengerjaan	W3.PL.02.01-73	CV. KORANA KARYA	213,709,000	30 Agustus 2010	PERENCANAAN KONSTRUKSI PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR LP WANITA PASAMAN (85%)	181,652,650
3	GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM Pengerjaan	W3.PL.02.01-149	CV. KARYA CIPTA CONSULTANT	49,000,000	04 November 2010	PENGAWASAN GEDUNG KANTOR LP WANITA PASAMAN (55%)	26,950,000
4	GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM Pengerjaan					BIAYA PENGELOLAAN ADMINISTRASI	28,434,300
5	GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM Pengerjaan	W3.PL.02.04-114A	CV. KARYA ENGINEER	313,500,000	15 September 2010	PERENCANAAN PEMBANGUNAN BLOK HUNIAN 2 LANTAI (APBN-P) GEDUNG KHUSUS LP WANITA PASAMAN (85%)	250,800,000
TOTAL KDP							2,810,836,950

C.10 Aset Lain-Lain

*Aset Lain-Lain
Rp140.903.000*

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp140.903.000 dan Rp140.903.000. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas.

Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2021	140.903.000
Mutasi tambah:	
Transfer Masuk	0
Mutasi kurang:	
Transfer Masuk	0
Saldo per 31 Desember 2022	140.903.000
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2022	-140.453.000
Nilai Buku per 31 Desember 2022	450.000

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
(Rp140.453.000)*

C.11 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing Rp140.453.000 dan Rp140.453.000. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud	0	0	0
Aset Lain-lain	140.903.000	-140.453.000	450.000
Jumlah	140.903.000	-140.453.000	450.000

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

*Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp30.642.048,-*

C.12 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp30.642.048,- dan Rp40.346.000. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Nilai utang kepada Pihak Ketiga

mengalami penurunan, akibat dari pembayaran dan penghapusan hutang.

C.13 Ekuitas

Ekuitas
Rp105.324.816.833

Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 105.324.816.833 dan Rp44.808.071.857. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan PNBPNP
Rp10.997.040

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp10.997.040 dan Rp9.445.015. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
Periode 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

URAIAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	10.997.040	9.445.015	16,43
Pendapatan Anggaran Lain-Lain	0	0	0,00
Jumlah	10.997.040	9.445.015	16,43

Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan berasal dari pendapatan sewa rumah dinas dari transaksi sampai dengan 31 Desember 2022.

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai
Rp 11.465.225.921

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp11.465.225.921 dan Rp11.238.416.391. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh

pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai
Periode 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

URAIAN	2022	2021	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji Pokok PNS	7.677.200.400	5.731.494.520	12,45
Beban Pembulatan Gaji PNS	120.245	93.813	28,18
Beban Tunj.Suami/Istri PNS	545.671.322	399.952.316	36,43
Beban Tunj. Anak PNS	162.713.544	124.070.280	31,15
Beban Tunj. Struktural PNS	440.170.000	338.995.000	29,85
Beban Tunj. Fungsional PNS	677.277.000	479.566.000	98,71
Beban Tunj. Pph PNS	34.307.038	26.552.798	29,20
Beban Tunj. Beras PNS	459.577.320	347.036.640	32,43
Beban Uang Makan PNS	1.183.127.000	816.148.000	-4,44
Beban Tunj. Umum PNS	181.455.000	141.195.000	28,51
Beban Uang Lembur	108.122.000	275.728.000	-60,79
Jumlah	11.469.740.869	8.680.832.367	32,13
Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	4.280.170	1.850.526	0,00
Pengembalian Beban uang makan	234.000	1.850.526	0,00
Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	778	-	0,00
Jumlah	11.465.225.921	8.678.981.841	32,10

Beban Persediaan
Rp111.972.390

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp111.972.390 dan Rp180.769.964. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan
Periode 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian Jenis Beban	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021	Naik (Turun) %
Beban Persediaan Konsumsi	111.972.390	180.799.964	-38,07
Jumlah Beban Persediaan	111.972.390	180.799.964	-38,07

*Beban Barang
dan Jasa
Rp3.860.740.640*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp3.860.740.640 dan Rp3.837.721.037. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa

Periode 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

URAIAN JENIS BEBAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	1.249.504.828	1.029.268.684	21,40
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2.127.500	5.398.500	(60,59)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	174.480.000	172.680.000	1,04
Beban Barang Operasional Lainnya	11.517.850	114.900.150	(89,98)
Beban Barang Operasional-Penanganan Pandemi COVID-19	15.714.590	11.946.335	0,00
Beban Bahan	383.699.150	220.345.300	74,14
Beban Honor Output Kegiatan	39.200.000	12.950.000	202,70
Beban Barang Non Operasional Lainnya	63.434.050	42.094.969	50,69
Beban Barang Non Operasional-Penanganan Pandemi COVID-19	275.100.445	376.852.190	0,00
Beban Langganan Listrik	405.760.615	343.195.985	18,23
Beban Langganan Telepon	15.883.018	15.632.724	1,60
Beban Langganan Air	32.256.900	22.476.200	43,52
Beban Sewa	1.111.407.694	1.444.482.000	(23,06)
Beban Jasa Profesi	74.500.000	9.400.000	692,55
Beban Jasa Lainnya	5.000.000	250.000	1900,00
Beban Jasa-Penanganan Pandemi COVID19	1.154.000	15.848.000	0,00
Jumlah	3.860.740.640	3.837.721.037	0,60

*Beban
Pemeliharaan
Rp850.830.692*

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp850.830.692 dan Rp.851.245.308. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Pemeliharaan
Periode 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

URAIAN JENIS BEBAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	238.559.400	278.401.036	(14,31)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	612.271.292	572.844.272	6,88
Jumlah	850.830.692	851.245.308	(0,05)

*Beban Perjalanan Dinas
Rp1.543.548.532*

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp1.543.548.532 dan Rp401.604.862. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Perjalanan Dinas
Periode 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

URAIAN JENIS BEBAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	1.054.604.532	363.954.862	189,76
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	32.200.000	37.650.000	(14,48)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	69.165.000	0	#DIV/0!
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	387.579.000	0	#DIV/0!
Jumlah	1.543.548.532	401.604.862	284,35

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban
Penyusutan dan
Amortisasi
Rp1.044.630.259*

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing

sebesar Rp1.044.630.259 dan Rp1.052.047.710. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2022 dan 30 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
Periode 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	467.145.518	487.783.194	(4,23)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	577.484.741	564.264.516	2,34
Jumlah Penyusutan	1.044.630.259	1.052.047.710	(0,71)
Jumlah Amortisasi	-	-	0,00
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.044.630.259	1.052.047.710	(0,71)

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Rp150

D.8 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2022 berasal dari Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Yang Lalu sebesar Rp150. Perbandingan Surplus dari Kegiatan Non Operasional PER 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

*Rincian Kegiatan Non Operasional
Periode 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

URAIAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	755.000	0,00
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1.295.198	0,00
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	150	52.000	0,00
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	8.732.000	0,00
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	150	10.834.198	(100,00)

*) *Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO)*

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal
Rp44.804.071.857*

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp44.804.071.857 dan Rp59.046.736.889.

*Defisit LO
(Rp18.865.951.244)*

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar (Rp18.865.951.244) dan (Rp18.398.446.148). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

*Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi
Rp0*

E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.0 dan (Rp 8.286.393.905).

*Koreksi Lainnya
Rp11.006.000*

E.3.6 Koreksi Lainnya

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.11.006.000 dan (Rp 0). Koreksi Lainnya terjadi akibat koreksi atas akun Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya.

*Transaksi Antar Entitas
Rp79.371.690.220*
0

E.5 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp79.371.690.220 dan Rp12.446.175.021. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua

atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

*Rincian Transaksi Antar Entitas
Periode 31 Desember 2022*

Transaksi Antar Entitas	Jumlah
Ditagihkan ke Entitas Lain	17.844.514.771
Ditagihkan dari Entitas Lain	10.997.190
Transfer Masuk	61.538.172.639
JUMLAH	79.371.690.220

*Ekuitas Akhir
Rp105.324.816.833*

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp105.324.816.833 dan Rp 44.808.071.857.

PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

- Pada Neraca AkruaI Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Padang (408798) masih terdapat akun Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar sebesar Rp30.642.048. Akun tersebut muncul karena adanya Utang kepada Pihak Ketiga yang merupakan kewajiban yang masih harus dibayar berupa Hutang Langganan Listrik sebesar Rp30.642.048 atas pemakaian Listrik bulan Desember 2022. Hutang ini muncul karena pencatatan transaksi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Padang (408798) menggunakan basis akruaI.
- Pada Neraca AkruaI Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Padang (408798) terdapat akun Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi akibat dari koreksi aset lainnya hasil dari transfer masuk yang berupa software. Dan aset tersebut dikoreksi ke aset tetap Peralatan dan Mesin sehingga nilai dari Peralatan dan Mesin bertambah.

LAMPIRAN

